

# EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KOTA MEDAN

Oleh:  
Yulesman Gulo  
Doli Tua Mulia Raja Panjaitan  
Rehmuli Karo-Karo  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail:  
[yulesmangulo@gmail.com](mailto:yulesmangulo@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to determine the effectiveness of BAPPEDA's role in improving the economic development of the city of Medan and the supporting factors for improving the economy of Medan City as well as the inhibiting factors. The approach used in this research is a qualitative descriptive method using data collection techniques through interviews, documentation and observation. The research results show that the supporting factors for improving the economy of the city of Medan cannot be separated from three indicators, namely input, output and results. Meanwhile, the inhibiting factors are delays in income, inadequate human resources and low levels of investors.*

*Keywords: BAPPEDA, Economy, Effectiveness, Role*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran BAPPEDA dalam meningkatkan pembangunan perekonomian kota Medan dan faktor pendukung peningkatan perekonomian Kota Medan serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung peningkatan perekonomian kota Medan tidak lepas dari tiga indikator yaitu masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterlambatan pemasukan, sumber daya manusia yang tidak memadai dan investor yang rendah.

Kata Kunci: BAPPEDA, Ekonomi, Efektivitas, Peran

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan dapat terwujud jika direncanakan dengan baik dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk membentuk individu yang memiliki kemakmuran secara material dan spritual dan raas keadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana negara Republik Indonesia merupakan negara Kesatuan yang diperoleh dengan memerdekakan dirik, bersatu dan rakyat yang berdaulat, dimana keadaan hidup bernegara dijamin keamanannya dengan menciptakan kedamaian dan ketertiban.

Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi yang memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan maka harus dilakukan melalui perencanaan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat tersusun rapi dan dilakukan secara matang, sehingga dapat dilakukan evaluasi pembangunan

untuk perbaikan pada tahap selanjutnya.

Wilayah kota Medan merupakan kota yang berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga seluruh kota Medan memiliki batas yang sama yaitu Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan terletak pada 2° 27' – 2° 47' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Kota ini terletak di bagian pantai Timur Sumatera Utara. Kota Medan memiliki jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan, kelurahan sebanyak 151 kelurahan dengan kepala lingkungan berjumlah 2001 kepling. Banyaknya jumlah kelurahan dan pemerintah kelurahan di kota Medan bertujuan untuk mempermudah berbagai pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan di Kota Medan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan secara merata (Pemerintah kota Medan, 2021).

Seiring dengan perkembangan jaman, setiap undang-undang terkadang tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui pergantian Undang-

Undang. Hal ini terjadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah kurang relevan dalam kehidupan bertatanegara serta semakin banyaknya tuntutan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang semakin baik, sehingga ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur hal-hal baru tentang urusan pemerintahan yaitu pada pasal 9 yang menyatakan bahwa dalam urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang absolut merupakan urusan pemerintahan yang merupakan wewenang dari pemerintah pusat, sedangkan urusan konkuren merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan secara desentralitis, dimana sebelum berlakunya undang-undang tersebut pembangunan ekonomi dilakukan secara sentralis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam membangun daerahnya termasuk dalam pembangunan ekonomi yang akan dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2024, maka setiap daerah dapat menggali keunggulan lokal yang dimilikinya untuk ditampilkan secara kompetitif dalam bentuk pembangunan ekonomi, sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya dengan keunggulan tersendiri dari daerah lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan maka peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat penting dalam melakukan perencanaan terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Bappeda bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, dimana Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikatakan bahwa Bappeda bertanggung jawab dalam perencanaan, penetapan, pengendalian, dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada tingkat daerah.

BAPPEDA merupakan alat pemerintah yang memiliki hak dan wewenang dalam perencanaan dan pengendali pembangunan yang dilakukan di daerah, pelaksana kerjasama yang dilakukan

antara pemberintah daerah kabupaten dan luar negeri dalam melakukan pembangunan. Dalam hal ini harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah yang melakukan pembangunan.

Dalam konsep otonomi daerah yang sifatnya desentralisasi maka diberikan kebebasan kepada kepala daerah dalam pembangunan wilayahnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pembangunan yang dilakukan dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya dengan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi termasuk menciptakan pembentukan institusi-institusi yang baru, pembangunan industri alternatif, pembangunan kapasitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mendapatkan produk dan jasa yang semakin baik, menciptakan pasar-pasar baru, meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta pemangungan usaha yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Manan, 2018: 73).

Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan seksama, dimana perencanaan merupakan tahap awal dalam melakukan pembangunan. Kesalahan dalam melakukan perencanaan akan membuat tujuan pembangunan yang dilakukan tidak akan tercapai dengan baik. Hal ini berarti perencanaan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan dalam bentuk unsur perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan dan harus diawali dengan perencanaan pada tingkat kelurahan, hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan melibatkan semua pemerintahan mulai dari tingkat terendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

Pemberlakuan No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat adanya perubahan pembangunan ekonomi dari sentralis menjadi desentralis. Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya termasuk dalam melakukan pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan otonomi daerah dimana setiap daerah dapat mengembangkan potensinya untuk mencapai kemandirian lokal dengan demikian setiap daerah dapat bersaing secara kompetitif dengan daerah lainnya. Pembangunan yang dilakukan mencakup seluruh aspek kehidupan diantaranya ekonomi, sosial, budaya serta ideologi. Dalam pembangunan

yang dilakukan umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan mikro, sektoral dan regional.

Pean BAPPEDA sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana lembaga ini memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan di daerah, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. BAPPEDA merupakan organisasi yang langsung dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. BAPPEDA juga adalah organisasi perangkat daerah dengan tugas melakukan perencanaan terhadap pembangunan yang dilakukan di dalam suatu pemerintah daerah.

Secara nasional pembangunan dilakukan secara makro, dimana capaian pembangunan yang dilakukan adalah upaya pencapaian tingkat sektoral dan regional. Dalam pembangunan sektoral pembangunan dilakukan dengan fokus pada bidang pertanian, ekonomi dan lain-lain, sedangkan da sektor regional pelaksanaan pembangunan difokuskan pada pembangunan itu sendiri.

Menurut BPS 2024, pemerintah Kota Medan berhasil meningkatkan nilai perekonomian pasca Pandemi Covid-19. Tingkat perekonomiannya masih 1,24 persen, pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan 1,98 persen. Pada tahun 2021 meningkat besar menjadi 2,62 persen, tahun 2022 menjadi 4,62 persen dan pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 4,76 persen.

Dari data BPS diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun peningkatan perekomian kota Medan selalu ada peningkatan, yang awalnya hanya 1,24 persen berubah secara drastis menjadi 4,76 persen dari tahun 2019 sampai pada tahun 2023.

Mengingat pentingnya peranan BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan daerah maka sangat diperlukan adanya koordinasi dan sinkroniasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama pada lintas batas, sehingga dapat dicapai pembangunan yang serasi pada suatu daerah. Pembangunan yang terencana dapat mengendalikan dan mengatur secara sengajat perekonomian oleh pemerintahan pusat agar dapat dicapai sasaran dan tujuan tertentu dengan waktu tertentu.

Sjafrizal (2015:28) menyatakan terdapat 3 jenis perencanaan pembangunan yaitu:

1. Rencana usia pembangunan daerah (RUPD) yaitu jangka waktu 1 tahun.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun.

3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun.

Dalam RPJMD pembangunan daerah direncanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dimana dokumen pembangunan tersebut merupakan dokumen rancna resmi daerah. Dalam RPJMD terdapat visi dan misi kepala daerah yang terpilih yang mecerminkan kredibilitas kepala daerah tersebut dalam melakukan pemanduan, pengarahannya dan membuat program perjalanan kepemimpinan dan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dan akan dipertanggungjawabkan pada akhir pemerintahannya.

Pembahasan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan BAPPEDA didasarkan pada asas skapa prioritas dengan melakukan kooridnasi dengan unit kerja pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Diharapkan dengan melakukan musyawarah tersebut maka perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan semakin baik. Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang dilakukan maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang membuat pelaksanaan pembangunan perekonomian dapat terlaksana secara merata. Dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan harus didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

Contoh kebijakan yang diterapkan BAPPEDA Kota Medan dalam meningkatkan pembangunan Kota Medan yaitu :

1. Pemberdayaan UMKM Melalui Digital Marketing.

Salah satu program pembangunan ekonomi yang dilakukan BAPPEDA Kota Medan yaitu: Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, Indonesia. UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi produk, dan memberdayakan masyarakat. Namun, mereka dihadapkan pada tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, pendidikan, dan regulasi. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM menjadi alat untuk mencapai kesetaraan dan distribusi kekayaan yang merata.

2. Kebijakan Sistem E-Planning dalam Bidang Ekonomi  
Didasarkan pada Perwal Medan No. 31 tahun

2021 tentang penyelenggaraan satu data disebutkan bahwa dalam perwujudan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, harus didukung dengan data yang akurat, terpadu, dan dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan sistem e-planning.

Dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan BAPPEDA juga menghadapi berbagai hambatan (bappeda.bulelengkab.go.id 2017) yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mendorong peningkatan investasi serta dapat dioptimalkannya pengaruh dari pembangunan ekonomi yang dilakukan dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM sejalan dengan peningkatan sektor produktif lainnya yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran, kemiskinan serta ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Contoh kendala atau hambatan adalah banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang belum bisa operasikan komputer secara baik dan benar atau belum efektif.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Teknologi

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan membuat masyarakat kurang mengerti terhadap pembangunan ekonomiyang akan dilakukan, sehingga masyarakat kurang merasa terlibat dan kurang mengerti manfaat pembangunan ekonomi yang akan dilakukan. Disamping itu masih rendahnya teknologi membuat pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik. Dalam konteks ini, ada beberapa halangan ataupun yang menjadi kendala diantaranya minimnya pendidikan dan pengetahuan serta minat dan bakat dalam hal teknologi

3. Akses terbatas terhadap Modal

Dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan salah satu faktor yang paling berperan adalah tersedianya modal dalam melakukan pembangunan tersebut. Masih terbatasnya akses terhadap modal membuat masyarakat tidak dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang akan dilakukan. Untuk itu diperlukan keterbukaan akses terhadap modal kepada masyarakat melalui pendanaan perbankan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hal ini sehingga menjadi

dalam pelaksanaan yaitu kurang modal atau dana dari masyarakat.

4. Permasalahan Regulasi

Banyaknya aturan dalam melakukan suatu kegiatan usaha membuat masyarakat merasa enggan untuk ikut dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan. Masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan regulasi-regulasi yang tumpang tindih yang membuat masyarakat menjadi tidak tertarik dalam mengikuti program pembangunan ekonomi yang akan dilakukan. Untuk itu perlu menyedeharnakan permasalahan regulasi yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi.

Dengan mengetahui berbagai faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan ekonomi kota Medan diharapkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengadakan suatu penelitian tentang **“Efektivitas Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Kota Medan”**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan yang direncanakan dan dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat dan tenaga yang direncanakan (Crisbiantoro, 2022: 508).

### 2.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAPPEDA adalah lembaga yang diciptakan dalam daerah yang memiliki peran untuk membantu kepala daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah yang dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (Panjaitan, 2023:5).

### 2.3. Pembangunan Perekonomian

Pembangunan perekonomian daerah merupakan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pembangunan daerah yang dilakukan diutamakan dalam meningkatkan jumlah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah. Untuk itu partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menggunakan sumber daya yang ada yang digunakan dalam merancang pembangunan perekonomian (Steeva, 2018: 132).

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan memahami fenomena-fenomena tentang pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam suatu daerah dan bagaimana peran BAPPEDA dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala BAPPEDA Kota Medan beserta jajarannya.

Untuk menganalisis data dilakukan melalui model interaktif, dimana pada model tersebut analisis dilakukan pada saat pengumpulan data dilakukan, setelah pengumpulan data dilakukan dalam satu periode dan seterusnya dilakukan analisis secara keseluruhan untuk menentukan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Efektivitas Peran BAPPEDA Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kota Medan**

Kota Medan adalah pusat ekonomi terbesar di Sumatera Utara, telah menghadapi beberapa tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peran BAPPEDA dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan ekonomi kota Medan.

Bappeda merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di kota Medan. Badan ini berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan kota, serta mengembangkan rencana dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan inklusif, Bappeda telah dapat membuat lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan

ekonomi kota Medan.

Salah satu keberhasilan utama Bappeda adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan inti di kota Medan. Misalnya, Bappeda telah mengidentifikasi kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas sebagai salah satu tantangan utama kota. Untuk mengatasi masalah ini, Bappeda telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan rencana dan strategi untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas di kota Medan. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Medan.

Selain itu, Bappeda juga telah berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di kota Medan. Dengan mengambil pendekatan yang inklusif dan adil, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warga kota, terlepas dari latar belakang atau status sosial-ekonomi mereka. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan inklusif, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Medan.

Secara keseluruhan, peran Bappeda dalam peningkatan pembangunan ekonomi kota Medan sangat signifikan. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan inklusif, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Medan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan kunci dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warga kota, terlepas dari latar belakang atau status sosial-ekonomi mereka. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Medan.

Bappeda, atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di daerah-daerah tertentu, termasuk kota-kota besar seperti Medan. Peran Bappeda dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Perencanaan Strategis

Bappeda memainkan peran penting dalam merencanakan strategi pembangunan ekonomi kota Medan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah kota, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kota, dan mengembangkan rencana strategis yang mencakup tujuan-tujuan spesifik, indikator kinerja, dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Koordinasi dan Evaluasi  
Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi implementasi rencana strategis di kota Medan. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa proyek-proyek dan inisiatif-inisiatif yang terkait dengan rencana strategis sedang berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengumpulan dan Analisis Data  
Bappeda memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan pembangunan ekonomi kota Medan. Mereka menggunakan data ini untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan, dan mengembangkan rencana strategis yang didasarkan pada analisis data ini.
4. Pemberdayaan Masyarakat  
Bappeda juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat kota Medan, terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Mereka bekerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan berbagai program yang menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang membuat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, Bappeda memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan melalui perencanaan strategis, koordinasi dan pengawasan, pengumpulan dan analisis data, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya, Bappeda dapat membantu menciptakan kota Medan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Indikator adalah ukuran atau yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja rencana strategi Bappeda untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Medan. Indikator-indikator ini dapat mencakup

berbagai aspek, termasuk:

1. PDB  
Indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi kota Medan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam kota selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing kota Medan. Berdasarkan data BPS Kota Medan pada tahun 2023-2024, Kota Medan memiliki angka perkenomian berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) mencapai 303,31 triliun.
2. Peningkatan lapangan pekerjaan  
Indikator lain yang penting adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah orang yang bekerja, tingkat partisipasi pekerjaan, dan tingkat pengangguran. Peningkatan lapangan pekerjaan dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rencana strategi Bappeda dalam menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023-2024 sebanyak 7,874 juta orang. Naik 136 ribu jika dibandingkan pada tahun 2022 naik sebesar 0,15 persen.
3. Peningkatan pendapatan per kapita  
Indikator lain yang penting adalah peningkatan pendapatan per kapita. Ini dapat diukur melalui peningkatan rata-rata pendapatan per orang di kota Medan. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rencana strategi Bappeda dalam meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023-2024, pendapatan perkapita kota Medan mencapai 4,71 persen.
4. Peningkatan investasi  
Indikator lain yang penting adalah peningkatan investasi. Ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah investasi langsung asing (FDI) dan investasi swasta lokal (LSI) di kota Medan. Peningkatan investasi dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rencana strategi Bappeda dalam menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, rincian penanaman modal atau investasi mencapai angka 31,39 Triliun.
5. Peningkatan daya saing  
Indikator lain yang penting adalah peningkatan daya saing. Ini dapat diukur melalui

peningkatan peringkat kota Medan dalam indeks daya saing global (GDI) dan indeks daya saing kota (CSI). Peningkatan daya saing dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rencana strategi Bappeda dalam meningkatkan daya saing kota Medan dan membuatnya lebih kompetitif di pasar global, peningkatan daya saing pada kota Medan tahun 2024 mencapai kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja rencana strategi Bappeda untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan. Dengan memantau dan mengevaluasi indikator-indikator ini secara teratur, Bappeda dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan rencana strategi.

#### **4.2 Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kota Medan**

Peningkatan pembangunan ekonomi kota Medan dapat dicapai melalui berbagai inisiatif, termasuk:

1. Meningkatkan investasi  
Salah satu cara utama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan adalah dengan meningkatkan investasi. Ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti menawarkan insentif pajak dan subsidi untuk perusahaan-perusahaan baru dan ekspansi, meningkatkan akses ke modal, dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menarik investasi. Pada tahun 2024, rincian penanaman modal atau investasi mencapai angka 31,39 Triliun.
2. Meningkatkan lapangan pekerjaan  
Cara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan adalah dengan meningkatkan lapangan pekerjaan. Ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti mendukung pengembangan keterampilan dan pelatihan pekerjaan, meningkatkan akses ke modal, dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menarik investasi. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023-2024 sebanyak 7,874 juta orang. Naik 136 ribu jika dibandingkan pada tahun 2022 naik sebesar 0,15 persen.
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan  
Cara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Ini dapat

dicapai melalui inisiatif seperti mendukung pengembangan keterampilan dan pelatihan pekerjaan, meningkatkan akses ke modal, dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menarik investasi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di Indonesia meningkat secara signifikan sudah memasuki episode yang ke 25 dan sekitar 60% diantaranya PAUD dan pendidikan menengah.

4. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas  
Cara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan adalah dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, seperti bandara, pelabuhan, dan jaringan transportasi. Ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kota Medan meningkat hingga mencapai angka 54,830%.
5. Meningkatkan daya saing  
Cara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan adalah dengan meningkatkan daya saing. Ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Peningkatan daya saing pada kota Medan tahun 2024 mencapai kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup inisiatif-inisiatif seperti meningkatkan investasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, dan meningkatkan daya saing.

Dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya, Bappeda dapat membantu menciptakan kota Medan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

#### **4.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Ekonomi Kota Medan.**

Peningkatan pembangunan ekonomi merujuk pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah atau

negara. Ini dapat dicapai melalui berbagai tindakan, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan, serta mempromosikan lingkungan bisnis yang kondusif.

Peningkatan pembangunan ekonomi dapat membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih baik bagi penduduk. Ini juga dapat membantu meningkatkan daya saing wilayah atau negara di pasar global dan menarik investasi dan bisnis asing. Tentu saja dalam hal ini memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan yang cukup mendalam. Tidak hanya sebatas pada makna, namun pada faktanya sangat-sangat berbeda.

Adapun faktor penghambat pembangunan ekonomi kota Medan antara lain:

#### 1. Keterlambatan pemasukan.

Peningkatan ekonomi kota Medan telah menghadapi beberapa tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan dalam pemasukan, yang mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh penduduk Medan untuk mengakses dan mengonsumsi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, transportasi yang lambat, dan kurangnya akses ke layanan keuangan. Keterlambatan dalam pemasukan dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi kota, karena dapat menghambat kemampuan penduduk untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan mengakses peluang pekerjaan dan pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan organisasi swasta telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur dan akses ke layanan keuangan di Medan. Misalnya, pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan jalan dan jembatan baru untuk meningkatkan konektivitas kota, dan organisasi swasta telah membentuk kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan layanan keuangan kepada penduduk Medan. Dengan mengatasi tantangan keterlambatan dalam pemasukan, kota Medan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya.

#### 2. Sumber daya manusia yang tidak memadai.

Sumber daya manusia yang tidak memadai adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi kota Medan. Sumber daya manusia merujuk pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah, dan kota Medan telah menghadapi tantangan dalam hal ini selama beberapa tahun terakhir. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan terampil dapat menghambat kemampuan kota untuk menarik investasi dan pekerjaan baru, serta menghambat kemampuan penduduk untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan organisasi swasta telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terampil di Medan. Misalnya, pemerintah telah berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan pekerjaan untuk membantu penduduk memperoleh keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan baru, dan organisasi swasta telah membentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan pekerjaan kepada penduduk Medan. Dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kota Medan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya.

#### 3. Investor yang rendah.

Investor rendah adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Medan. Investor merujuk pada individu atau entitas yang menginvestasikan uang atau sumber daya lainnya dalam bisnis atau proyek di suatu wilayah, dan kurangnya investor dapat menghambat kemampuan kota untuk menarik investasi dan pekerjaan baru.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan organisasi swasta telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah investor di Medan. Misalnya, pemerintah telah berinvestasi dalam program dukungan dan insentif untuk membantu menarik investor baru ke kota, dan organisasi swasta telah membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan dan investor lainnya untuk menyediakan dukungan dan sumber daya kepada investor baru di Medan. Dengan meningkatkan jumlah investor, kota Medan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya.

## 5. KESIMPULAN

1. Efektivitas peran Bappeda dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kota Medan memiliki tiga indikator yakni *input*, *output* dan *outcome*. Dengan mengambil



pendekatan yang holistik dan inklusif berdasarkan indikator, Bappeda telah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomikota Medan. Ketiga indikator tersebut telah berjakan dengan baik, sehingga pembangunan peningkatan pembangunan perokonomian kota Medan terlaksana dengan baik. Dan adapun indikator pembangunan ekonomi yaitu pendapatan perkapita kenaikan mencapai 4,71%, PDB mencapai 303,31 triliun, indeks pembangunan manusia dalam membuka lapangan pekerjaan mencapai angka 7,874 iuta, dan investasi 31,39 triliun. Indikator indeks pembangunan manusia masih belum mencapai target kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan.

2. Pada peningkatan pembangunan ekonomi kota Medan, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhinya dimana ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mempromosikan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Pelakunya adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis dan investor untuk berkembang, dan mereka dapat berdampak signifikan pada keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Beberapa faktor pendukung umum meliputi *input* (pemasukan) dan *output* (keluaran). Sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Mereka adalah elemen penting yang dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pengembangan ekonomi. Beberapa faktor penghambat meliputi: keterlambatan pemasukan, sumberdaya manusia yang tidak memadai dan investor yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coralie B. dan Louise G. W. 2015. *Manajemen Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Hakim, A. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 1. Ekonisia. Yogyakarta.
- Nugroho, D. R. 2013. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Computindo. Jakarta.
- Riyadi, 2014.

*Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Siagian, S. P. 2015. *Administrasi Pembangunan*. Edisi 2. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, T. 2013. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tjokromidjojo, B. 2014. *Perencanaan Pembangunan, Haji Mas Agung*. Jakarta.
- Todaro, 2013. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Delapan. Erlangga. Jakarta.